



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## EVALUASI ARUS MUDIK DAN BALIK LEBARAN 2025

**Dewi Restu Mangeswuri**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dewi.mangeswuri@dpr.go.id](mailto:dewi.mangeswuri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, melaporkan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, terkait evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 pada tanggal 23 April 2025. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025 yang dinilai berjalan lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat mobilitas masyarakat selama mudik 2025 mencapai 154.62 juta orang atau melebihi dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub yang bekerja sama dengan Litbang Kompas yaitu sekitar 146,48 juta jiwa. Sementara untuk jumlah keseluruhan penumpang angkutan umum adalah 27,672 juta penumpang dengan komposisi terbesar mencapai 30 persen menggunakan moda kereta api. Data *traffic* penumpang angkutan umum untuk moda transportasi udara, darat, laut, dan kereta api Lebaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah *Traffic* per Moda pada Masa Lebaran 2025

No.	Moda Transportasi	Jumlah Penumpang
1.	Angkutan Jalan	5,554 juta
2.	Kereta Api	8,301 juta
3.	Angkutan Laut	2,248 juta
4.	Angkutan Udara	5,698 juta
5.	Moda Penyeberangan	5,823 juta

Sumber: Kemenhub (2025)

Koordinasi antarsektor dan kementerian/lembaga pemangku kebijakan dinilai berhasil, ditandai dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 34,31 persen dari 7.064 kasus pada 2024 menjadi 4.640 kasus tahun ini. Menhub mengatakan bahwa kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat terwujud berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, *stakeholders*, serta operator transportasi terkait. Dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kemenhub telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga, sehingga penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Pelaksanaan kebijakan seperti *work from anywhere* (WFA) untuk ASN dan pegawai BUMN, mulai 24—27 Maret 2025 dan 8 April 2025 dianggap sangat efektif mengurangi kepadatan arus mudik dan balik. Kemenhub telah menerbitkan setidaknya sepuluh landasan kebijakan berupa keputusan menteri dan/atau kesepakatan lintas kementerian/lembaga dan/atau keputusan/instruksi direktur jenderal, sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, secara khusus mengapresiasi pengelolaan arus mudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni. PT ASDP dirasa telah berhasil memperbaiki manajemen dengan menerapkan sistem tiket satu harga, mencabut tarif ekspres,

serta memberikan diskon tarif reguler bagi kendaraan penumpang selama periode Lebaran 2025. Namun, ada beberapa catatan kritis atas pelaksanaan mudik tahun ini. Pertama, belum meratanya pelaksanaan *ramp check* terhadap kendaraan angkutan yang dinilai sangat penting untuk menjamin keselamatan pemudik. *Kedua*, masih maraknya praktik travel gelap yang membahayakan keselamatan penumpang. *Ketiga*, masih sering terjadi pelanggaran pengguna jalan di perlintasan sebidang yang menimbulkan korban jiwa. *Keempat*, harga tiket pesawat tetap melonjak menjelang Lebaran 2025 meski pemerintah telah mengumumkan diskon 13 hingga 14 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi pada 24 Maret hingga 7 April 2025.

## Atensi DPR

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Hal ini disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Komisi V DPR RI perlu mendukung pemerintah untuk terus melakukan perbaikan pelayanan, misalnya dalam hal perbaikan atau penyempurnaan infrastruktur jalan, dermaga, dan *rest area*. Komisi V DPR RI diharapkan dapat melakukan pengawasan dengan meninjau langsung titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan, serta mengumpulkan aspirasi dari petugas lapangan, pengguna jalan, dan sopir angkutan umum. Meskipun penyelenggaraan dirasakan semakin membaik, Komisi V DPR RI perlu meminta pemerintah terus meningkatkan koordinasi antarinstansi demi penyempurnaan angkutan mudik dan balik lebaran tahun berikutnya dengan memperhatikan masukan dan evaluasi.

## Sumber

ekonomi.republika.co.id, 24 April 2025;  
Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI tanggal 23 April 2025;  
tempo.co, 24 April 2025;  
tribunnews.com, 25 April 2025.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*